

ISBN: 979-3450-04-5

PROSIDING SEMINAR DAN EKSPOSE TEKNOLOGI

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
JAWA TIMUR**

MALANG, 9 - 10 Juli 2002



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Bogor, 2003**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
RUMUSAN SEMINAR TAHUNAN DAN EKSPOSE HASIL PENELITIAN/ PENGAJIAN BPTP JAWA TIMUR	iv
DAFTAR ISI	vii
I. MAKALAH UTAMA	
PROSPEK DAN TANTANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DI MASA DEPAN	1
<i>B. Lema, T. Siniati, dan N. Pangarsa</i>	
UJI PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN PADI SECARA TERPADU PADA SAWAH IRIGASI DI JAWA TIMUR	12
<i>M.C.Mahfud, Handoko, H.Subagio, M.I.Wahab, C.Ismail, Suhardi, G.Kustiono dan W.Istuti</i>	
PEMBUATAN KEJU DENGAN ENZIM RENIN (<i>Mucor pusillus</i>)	37
<i>Lilik Eka Radiati</i>	
ANALISIS KEBIJAKAN: KONSEP DASAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN	46
<i>Pantjar Simatupang</i>	
KONSEP DAN PENERAPAN KIMBUN	65
<i>Dinas Perkebunan Prop. Jatim</i>	
REVIEW HASIL PENGAJIAN PENERAPAN PHT PADA SAYURAN	80
<i>Luki Rosmahani</i>	
PROGRAM PENGAJIAN PENGEMBANGANINTEGRASI USAHATANI PADI SAWAH SAPI POTONG INDUK DI BPTP - JAWA TIMUR	100
<i>M. A. Yusran, M. Soleh dan G. Kartono</i>	
II. MAKALAH PENUNJANG	
A. Padi dan Palawija	
PENGAJIAN SISTEM USAHATANI PADI DI EKOREGION LAHAN SAWAH YANG MENDERITA STAGNASI PERTUMBUHAN DAN KEKUNINGAN (ASEM-ASEMAN)	111
<i>Al. Gamal Pratomo, Suyamto, Suwono, Lulus Sunaryo, Roesmiyanto, Gatot Kartono, Eli Korlina, Edy Purnomo dan Wigati Istuti</i>	
PENYUSUNAN REKOMENDASI PEMUPUKAN P DAN K PADI SAWAH BERDASARKAN STATUS HARA P DAN K DI PASURUAN DAN LUMAJANG	125
<i>Suwono, Much. Soleh, Mardjuki, E. Purnomo, M. Saeri, L. Sunaryo, F. Kasijadi dan Suyamto</i>	

PENGKAJIAN PUPUK ALTERNATIF PADA TANAMAN PADI DI JAWA TIMUR	134
<i>F. Kasijadi, Suwono, Gatot Kartono, Agus Suryadi, Chamdi Ismail, Endang P.K. Hendry suseno, Abu dan Suyamto</i>	
PENGUJIAN VARIETAS LOKAL PADI JAWA TIMUR	146
<i>Sunarsedyono, Suyamto, Sukarno Roesmarkam, Chamdi Ismail, Wigati Istuti, Sri Yuniastuti, Herman Subagyo, Rohmad Budiono, Abu Mansyur</i>	
PENGARUH PUPUK P, K DAN PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI DI LAHAN TADAH HUJAN	172
<i>S. Roesmarkam, A. Suryadi, S. Zunaini, S dan Suwono</i>	
ADAPTASI VARIETAS PADI PADA LAHAN TADAH HUJAN	177
<i>S. Roesmarkam, A. Suryadi, S. Zunaini, S dan Suyamto</i>	
COOPERATIVE FARMING PADA LAHAN SAWAH TADAH HUJAN BERBASIS PADI GOGO RANCAH	182
<i>S. Roesmarkam, H. Subagyo, A. Suryadi, Sarwono, Suyamto dan S. Saadah</i>	
PEMBENTUKAN VARIETAS UNGGUL PADI SPESIFIK LOKASI JAWA TIMUR SECARA PARTISIPATI	189
<i>S. Roesmarkam, Baswarsiati, M. Sugiarto, Suyamto, G. Kartono, Suwono, B. Pikukuh, Al. G. Pratomo, PER. Prahardini, G. Kustiono, C. Ismail, Abu, Supri dan S. Zunaini</i>	
UJI ADAPTASI GALUR-GALUR HARAPAN CALON VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH	204
<i>Baswarsiati, W. Istuti, S. Roesmarkam, B. Pikukuh, H. Suseno, R. Budiono, Rokaib, Sulyanto</i>	
UJI ADAPTASI CALON VARIETAS UNGGUL JAGUNG SPESIFIK LOKASI LAHAN KERING	216
<i>B. Pikukuh, Abu, Sarwono, Handoko, dan S. Roesmarkam</i>	
PENGKAJIAN SISTEM USAHATANI JAGUNG DI LAHAN KERING	224
<i>F. Kasijadi, M.I. Wahab, S. Roesmarkam, H. Suseno, B. Tegopati, Suhardi, W. Istuti, S.R. Sumarsono dan Wahyunindyawati</i>	
UJI ADAPTASI CALON VARIETAS UNGGUL KEDELAI BERBIJI BESAR SPESIFIK LOKASI LAHAN SAWAH	233
<i>Gunawan Effendi, Rusmiyanto dan Suryantoro</i>	
PENGKAJIAN PRODUKSI BENIH KACANG TANAH VARIETAS UNGGUL	240
<i>Chamdi Ismai, Al. Budijono, dan Gatot Kustiono</i>	

PENGAJIAN SISTEM USAHATANI KACANG TANAH DI EKOREGIONAL LAHAN KERING	252
<i>F. Kasijadi, Suhardjo, S. Roesmarkam, Suwono, Al. Budiyono, Wahyunindyawati, Ono Sutrisno, Abu, dan H. Nafik</i>	
UJI ADAPTASI CALON VARIETAS UNGGUL KACANG HIJAU SPESIFIK LOKASI LAHAN SAWAH	262
<i>Gatot Kustiono, Suwarno dan Gunawan Efendi</i>	
B. Tanaman Hortikultura	
PROSPEK PENGEMBANGAN BUAH NAGA (THANG LOY) DI JAWA TIMUR	267
<i>H.T. Soelistyari, T. Siniati, K. Blasius Lema, W.H. Utomo</i>	
VISITOR PLOT JAMUR TIRAM (<i>Pleurotus spp.</i>)	272
<i>W. Istuti, T. Siniati, dan E. Retnaningtyas</i>	
PENGAJIAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN KERUSAKAN BUNGA MANGGA DI MUSIM HUJAN	280
<i>Al. Budijono, T. Purbianti, E. Retnaningtyas dan Wahyudi</i>	
PENGAJIAN PENGATURAN PEMBUNGAAN MANGGA DI DATARAN MEDIUM	288
<i>Al. Gamal Pratomo, Djoko Wijadi, Al. Budijono, M. Sugiyarto dan Martono</i>	
PENGAJIAN PENGGUNAAN ZAT PENGATUR TUMBUH DAN PUPUK ORGANIK PADA BEBERAPA KLON ANGGUR HARAPAN BANJARSARI	295
<i>B. Tegopati, N. Istiqomah</i>	
PENGARUH PENGGUNAAN ZPT TERHADAP PEMBUNGAAN DAN PRODUKSI PADA EMPAT VARIETAS MANGGA UNGGUL	303
<i>D. Rachmawati, S. Yuniastuti, Samad dan Indriana R.D.</i>	
UJI ADAPTASI GALUR HARAPAN CALON VARIETAS UNGGUL CABAI MERAH	311
<i>E.P Kusumainderawati, E. Retnaningtyas, Baswarsati, Sarwono, E. Korlina dan Prayitno. S</i>	
UJI ADAPTASI RAKITAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN CABAI	319
<i>E.P. Kusumainderawati, W. Istuti, Sarwono, N. Istiqomah dan Prayitno. S</i>	
PENGAJIAN PEMANFAATAN BIOPESTISIDA DAN PUPUK HAYATI MENDUKUNG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADA TOMAT	327
<i>L. Rosmahani, E. Korlina, M. Soleh, Dwi Setyorini</i>	

PROSPEK DAN TANTANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DI MASA DEPAN

Prospect And Challenge Of Agricultural Extension In The Future

Blasius Lema, Tini Siniati, dan Nugraha Pangarsa

ABSTRAK

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era agribisnis ini adalah pada kenyataannya usaha tani di Jawa Timur didominasi oleh usaha tani skala kecil. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung pada perubahan perilaku petani dalam menyikapi tantangan tersebut. Pemberdayaan petani perlu dilakukan melalui pembangunan sistem penyuluhan pertanian yang mampu membantu petani baik dalam penerapan teknologi inovasi berwawasan agribisnis yang menghasilkan produk bermutu sesuai permintaan pasar global maupun mengembangkan diri untuk menjadi manager usaha tani yang handal. Penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan luar sekolah (non formal) bagi petani beserta keluarganya serta anggota masyarakat pertanian lainnya di pedesaan (Munandar, 2000; Zahir, 2000 serta Hawkins dan Van den Ban, 1999). Dengan demikian, penyuluhan pertanian adalah upaya untuk membantu petani dan keluarganya dalam menciptakan iklim pendidikan/pembelajaran petani yang kondusif, sehingga pada akhirnya mereka mampu menolong dirinya sendiri. Untuk mengetahui prospek dan tantangan penyuluhan masa depan telah dilakukan desk studi data primer dan sekunder, observasi langsung ke Dinas Kabupaten/Kota serta hasil diskusi dalam Lokakarya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang diadakan oleh Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur pada tanggal 26-27 Juni 2002 di Lawang. Hasil yang dicapai adalah keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berhubungan erat dengan kegiatan di bidang: lembaga penelitian sebagai sumber teknologi, lembaga pelayanan (services), lembaga pengaturan yang mendukung sistem penyuluhan, serta masyarakat tani dan kelembagaannya sebagai subyek pembangunan pertanian. Penumbuhan, pengembangan dan pembinaan kelompok tani belum optimal, yaitu 29.791 kelompok sedangkan potensi Jawa Timur mampu ditumbuhkan 106.292 kelompok tani. Berlakunya otonomi daerah, membuahkan penataan kelembagaan sebagai wadah penyuluhan pertanian di Jawa Timur bervariasi yaitu: 65% berada di Dinas, 31% berada di KIPP/BIPP-KP/KUKP/Bimas-KP dan 3,5% pada KINLUH. Kondisi ini menyebabkan jaringan kerjasama penyuluh pertanian pusat, propinsi, kabupaten hingga petani menjadi lemah. Pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Jawa Timur ditawarkan lima model, yaitu LAKU, LAKU-MOD, LAKON, P4K dan Swakarsa, menganut prinsip penyuluhan pertanian profesional, dinamis, efektif dan efisien. Dalam praktek penyelenggaraannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau gabungan dari lima model tersebut.

Kata kunci: prospek, tantangan, penyuluhan pertanian, masa depan

ABSTRACT

The challenge of agriculture development in facing agribusiness era is that, in the reality, farm-business in East-Java is dominated . small-scale farm-business. The success of agriculture development indeed depends on the behaviour-change of farmers in responding to the challenge. Farmers empowering needs to be done through the development of agriculture extension system that enable to help farmers both in agribusiness-based on innovative technology application that can produce quality products, of which can meet the global-market demand, also to become the leading farm-business manager. Agriculture extension has a very strategic-role in agriculture development due to their task and function in organizing non-formal education for farmers and their family members also other farmer society in the rural areas (Munandar, 2000; Zahir, 2000, also Hawkins & Van den Ban, 1999). Thus, agriculture extension is an effort to help farmers and their family-members in creating conducive learning/educating climate for farmers so that, at last, they can help themselves. To find out the future prospect and challenge of agriculture extension, there have been conducted: desk-study on primary and secondary data, direct-observation to resencial/municipal service, also utilize the discussion-results of workshop on the running of agriculture service of East-Java on the 26th-27th June 2002 in Lawang. From the study above, resulting the fact that the success of agriculture extension implementation is closely related with activities of researech institution as technology provider, service-institutions, regulating institutions that support extension-system, also farmer society and their institutions as the subject of agriculture development. Nowadays, the formation, not development, and guidance of farmers groups do not function optimally, namely 29.791 farmers groups while the potential of East-Java it can form a number of 106.292 farmers groups. As the conesquency of the decentralization, institution organization, as the centres for agriculture extension in East-Java varies such this: 65% stationed/employed at service, 31% employed at ICIPP/BiPP-KP/KUKP/BIMAS-KP, and 35% at KINLUH. This condition causes the weak-cooperation network among central agriculture extension workers, provincial, regencial, and farmers. Five models for East-Java agriculture extension implementation have been offered: they are: LAKU (training & visit); LAKU-MOD (Modified Training and visit), LAKON (Service & consultation), P4K, and self-initiative with a principle of agriculture extension that is professional, dynamic, effective, and efficient. In practice, the implementation can be separately/solely conducted or being combined of the four models.

Key words: prospect, challenge, agriculture extension, future-life

PENDAHULUAN

Dalam Pola Dasar Pembangunan Jawa Timur 2001-2005 disebutkan, bahwa misi utama pembangunan daerah Jawa Timur adalah mengembangkan perekonomian terpadu yang berorientasi global berbasis potensi daerah dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya alam yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Sektor pertanian diyakini mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Berpijak dari hal tersebut maka pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada

pengembangan sistem usaha agribisnis yang berkerakyatan, berdaya saing, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, program peningkatan produksi pertanian Jawa Timur difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan berwawasan agribisnis, pemberdayaan ekonomi petani, peternak dan nelayan, serta peningkatan produksi dan daya saing komoditas ekspor melalui optimalisasi potenssi lahan (Bappeda Jawa Timur, 2000; Imam Utomo, 2000). Ketiga fokus tersebut saling terkait, dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan berwawasan agribisnis dan peningkatan daya saing komoditas pertanian dilaksanakan dengan asas manfaat bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era agribisnis ini adalah pada kenyataannya usaha tani di Jawa Timur didominasi oleh usaha tani skala kecil, tingkat pendidikan petani masih rendah, berlahan sempit dan bermodal kecil. Kondisi petani dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif karena menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Selain dari pada itu keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung pada perubahan perilaku petani dalam menyikapi tantangan tersebut.

Melihat kondisi demikian, perlunya memberdayakan petani yang dilakukan melalui pembangunan sistem penyuluhan pertanian yang mampu membantu petani baik dalam penerapan teknologi inovasi berwawasan agribisnis yang menghasilkan produk bermutu sesuai permintaan pasar global maupun mengembangkan diri untuk menjadi manager usaha tani yang handal.

Penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan luar sekolah (non formal) bagi petani beserta keluarganya serta anggota masyarakat pertanian lainnya di pedesaan (Munandar, 2000; Zachri, 2000 serta Hawkins dan Van den Ban, 1999). Dengan demikian, penyuluhan pertanian adalah upaya untuk membantu petani dan keluarganya dalam menciptakan iklim pendidikan/pembelajaran petani yang kondusif, sehingga pada akhirnya mereka mampu menolong dirinya sendiri.

BAHAN DAN METODE

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data dan informasi yang dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil observasi langsung ke Dinas/Instansi Pertanian Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Data sekunder diperoleh dari hasil Lokakarya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Jawa Timur pada tanggal 26-27 Juni 2002 di Bedali, Lawang.

Cakupan Analisis

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan ini difokuskan pada Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Secara Partisipatif Pilihan Jawa Timur, dengan menganalisis data primer dan sekunder secara desk studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Salmon Padmanegara (1973), keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian berhubungan erat dengan kegiatan di bidang: lembaga penelitian sebagai sumber teknologi, lembaga pelayanan (services), lembaga pengaturan yang mendukung sistem penyuluhan, serta masyarakat tani dan kelembagaannya sebagai subyek pembangunan pertanian.

1. Kondisi Petani dan Kelembagaannya

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung pada perubahan perilaku petani dalam menyikapi kondisi yang ada. Dalam Renstra BPTP Jawa Timur 1997-2007 terhimpun keberadaan kondisi petani diantaranya adalah: 1) pada umumnya tingkat pendidikan adalah SD; 2) pemilikan lahan sempit; 3) modal usaha kecil dan 4) regenerasi petani berjalan lambat karena generasi muda yang produktif kurang tertarik bekerja di bidang pertanian. Kondisi ini akan berdampak pada skala usaha dan pendapatan petani. Tugas penyuluhan pertanian disini adalah menumbuhkan, mengembangkan dan membina kelompok tani dan keluarganya. Kelompok-kelompok tani tersebut berfungsi sebagai kelas belajar-mengajar, wahana kerjasama, dan unit produksi/unit ekonomi. Beberapa kelompok dapat tumbuh dan berkembang membentuk koperasi tani (Koptan) asosiasi tani atau gabungan kelompok tani atau berupa perusahaan pertanian.

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada 29 kabupaten responden di Jawa Timur menunjukkan adanya kelompok tani yang berjumlah 29.791 kelompok. Berdasarkan pembagian kelas kelompok tani, maka diperoleh kelas Pemula 12.057 kelompok, kelas Lanjut 13.422 kelompok, kelas Madya 4.027 kelompok dan kelas Utama 285 kelompok (Yunani, 2002).

Jumlah kelompok tani yang ada ini dianggap kurang optimal, karena dalam Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur 2001-2005, disampaikan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sesuai hasil sensus bulan Juni 2000 adalah 34.525.588 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut bila diasumsikan 1 KK beranggotakan 5 orang, maka terdapat sekitar 6.905.117 KK. Dari jumlah penduduk tersebut, yang bekerja disektor pertanian adalah berkisar 46,18%, sehingga perkiraan jumlah keluarga tani kurang lebih 3.188.783 KKT, sisanya tersebar di sektor industri (22,32%), perdagangan (18,80%) dan sektor jasa (12,70%). Bilamana jumlah anggota kelompok tani diasumsi rata-rata 30 orang per kelompok maka diperoleh jumlah 106.292 kelompok tani. Jumlah kelompok tani inilah yang seharusnya menjadi sasaran pembangunan pertanian.

Upaya yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani yang mengacu pada SK Mentan No. 93/Kpts/OT.210/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani, yaitu: 1) penumbuhan kelompok tani berdasarkan domisili petani, sehingga setiap dusun terdapat satu kelompok tani; 2) pada tingkat desa dipilih satu ketua kelompok tani sebagai KTNA Desa; 3) pada tingkat BPP Kecamatan dibentuk kelompok KTNA Kecamatan dan; 4) pada tingkat kabupaten dibentuk kelompok KTNA Kabupaten.

2. Kondisi Penyuluh

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian merupakan upaya membangun masyarakat secara persuasif edukatif yang dilakukan melalui proses belajar mengajar dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar (Munandar, 2000). Oleh karena itu

revitalisasi penyuluhan pertanian yang dilandasi oleh SKB Mendagri dan Mentan No. 54 tahun 1996, pada dasarnya merupakan upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan kembali penyuluhan pertanian pada khitaknya, yaitu berorientasi pada pelayanan kepentingan petani dan keluarganya.

Jumlah penyuluh pertanian di Jawa Timur pada tahun 2001 adalah 3.022 orang dan Mantan 566 orang, hingga penulisan ini (Juli, 2002) tidak ada penambahan. Jumlah penyuluh yang ada ini diperkirakan berkurang sekitar 50% karena pensiun dan beralih fungsi ke jabatan struktural sejak diberlakukan kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan rasio pelayanan penyuluhan ke petani menjadi berkurang. Bila dibandingkan antara jumlah penyuluh dengan jumlah kelompok tani yang ada, maka rasio pelayanan menjadi 1 : 20. Bila dibandingkan dengan jumlah penumbuhan kelompok tani yang optimal yang seharusnya ada, maka rasio pelayanan menjadi 1: 70. Padahal idealnya rasio pelayanan penyuluhan adalah satu penyuluh membina 16 wilayah kelompok kerja penyuluhan (Wilkel).

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan penyuluhan di Jawa Timur diketahui bahwa kinerja penyuluhan pertanian saat ini pada umumnya rendah (Team PPS Diperta Jatim, 2002). Indikatornya dapat diketahui dari hasil evaluasi aktivitas penyuluhan pertanian dengan responden petani digambarkan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Aktivitas Penyuluhan Pertanian di Jawa Timur

No	Jenis Kegiatan	Jawaban	Prosentase (%)
1.	Pelatihan yang dilakukan Dinas/Instansi Kabupaten/ Kecamatan dan Penyuluh Pertanian	a. 3 bulan sekali	36
		b. 1 tahun sekali	23
		c. 6 bulan sekali	15
2.	Kunjungan PP ke kelompok tani	a. sebulan sekali	47
		b. 2 minggu sekali	42
		c. 3 bulan sekali	7
3.	Pertemuan rutin kelompok yang dihadiri pembina/PPL	a. sebulan sekali	40
		b. 2 minggu sekali	22
		c. 3 bulan sekali	16
4.	Penyebaran Informasi pertanian (brosur, dll)	a. 2-4 macam	38
		b. < 2 macam	24
		c. > 4 macam	20

(Yunani, 2002)

3. Kondisi Kelembagaan

Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian seperti BIPP/BPP mempunyai peran dalam pengembangan profesionalisme penyuluh dan petani yang startegis. Menurut Munandar (2000), peran yang perlu diwujudkan di BIPP/BPP tersebut adalah: 1) sebagai sentra komunikasi, informasi dan promosi inovasi teknologi pertanian/agribisnis; 2) sebagai sentra pengembangan program penyuluhan yang berlandaskan kepentingan dan aspirasi petani; 3) sebagai sentra pengembangan kemitraan usaha/agribisnis; 4) sebagai sentra pelayanan jasa pendidikan/ pembelajaran petani dan keluarganya dalam pengembangan agribisnis dan; 5) sebagai sentra manajemen penyelenggaraan penyuluhan yang profesional.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, urusan penyuluhan pertanian telah diserahkan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya telah membuahkan keragaman dalam

sistem penyelenggaraan penyuluhan, organisasi maupun mekanisme kerja penyuluhan pertanian, namun pada prinsipnya mengarah pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tepat guna dan berhasil guna.

Penataan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten di Jawa Timur cukup bervariasi. Hasil evaluasi sistem penyuluhan yang dilakukan oleh Team PPD Dinas Pertanian Propinsi (2002) diperoleh data dari 29 kabupaten responden, wadah penyelenggaraan penyuluhan pertanian (SATMINKAL) sebagian besar berada di Dinas (19 kabupaten atau 65%), di KIPP/BIPP-KP/KUKP/BIMAS-KP dan sejenisnya (9 kabupaten atau 31%), dan terdapat satu kabupaten (3,5%) yang menempatkan kelompok penyuluh bergabung dengan eks. Kandep penerangan dalam bentuk Kantor Informasi dan Penyuluhan (KINLUH), secara rinci keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian disajikan dalam lampiran 1. Melihat keragaman kelembagaan ini akan berdampak pada jaringan kerjasama penyuluh pertanian pusat propinsi, kabupaten, hingga petani dalam hal: 1) komunikasi, informasi dan promosi inovasi teknologi; 2) pengembangan program penyuluhan pada kepentingan dan aspirasi petani; 3) pengembangan kemitraan usaha/ agribisnis; 4) pelayanan jasa pendidikan/pembelajaran petani dan keluarganya dalam pengembangan agribisnis; dan; 5) manajemen penyelenggaraan penyuluhan yang profesional, menjadi semakin lemah. Disisi lain ada kabupaten/kota yang masih mencari bentuk kelembagaan (belum mantab).

4. Pola Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

a. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian

Menurut Munandar (2000), sistem penyuluhan pertanian yang sedang ditata kembali dan direvitalisasi kembali diarahkan kepada terwujudnya sistem penyuluhan pertanian yang profesional, dinamis dan efisien, dengan beberapa karakteristik sistem penyuluhan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang digerakkan oleh kepemimpinan petani
Semua keputusan program dan kegiatan menyelenggarakan penyuluhan pertanian dimulai dari petani, yang pada akhirnya dilaksanakan sendiri oleh petani dan untuk petani. Para kontak tani dan KTNA diberdayakan agar mampu bertindak sebagai penyuluh pertanian swakarsa.
2. Sistem yang bertumpuh pada kekuatan kerjasama
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian diarahkan mampu mendorong kemampuan petani membangun kerjasama antar petani dengan Perguruan Tinggi, Balai Penelitian/Pengkajian, LSM, dan organisasi lainnya dalam kemitraan usaha agribisnis.
3. Sistem yang bertumpuh pada otonomi daerah
Sistem otonomi daerah, memungkinkan penyuluhan pertanian diarahkan untuk terselenggaranya melalui pendekatan spesifik lokalita dan keunggulan kompetitif wilayah, sehingga efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya serta demokratisasi pembangunan pertanian tercapai.
4. Keterpaduan program berwawasan agribisnis dan kelestarian lingkungan
Sistem penyuluhan pertanian diarahkan melalui pendekatan farming sistem pendekatan pasar dengan optimalisasi lahan tanpa merusak lingkungan. Petani diarahkan sebagai pengusaha, produsen, maupun sebagai pelaku agribisnis melalui kemitraan.

5. Sistem yang diwadahi oleh kekuatan kelembagaan
Sistem penyuluhan perlu diwadahi oleh suatu kelembagaan penyuluhan yang berfungsi sebagai unit pelayanan pendidikan/pembelajaran oleh penyuluh pemerintah, yang bekerjasama dengan penyuluh pertanian wakarsa. Hal ini untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan profesionalisme penyuluh untuk pengembangan kepemimpinan petani.
6. Sistem yang dilayani oleh satu kesatuan korps penyuluh pertanian
Pelayanan oleh satu korps penyuluh pertanian diarahkan untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas penyuluhan (pemerintah dan swasta) dalam memberikan pelayanan kepada petani. Selain itu juga untuk mewujudkan organisasi profesi penyuluh pertanian yang kuat dan efisien.
7. Sistem yang didukung oleh profesionalisme penyuluh pertanian
Sistem penyuluhan pertanian yang diarahkan untuk mengembangkan profesionalisme penyuluh sebagai profesi yang mandiri, melalui pengembangan keahlian dan keberpihakan kepada petani, serta meningkatkan citra penyuluhan.

b. Pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Jawa Timur

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiada lagi keharusan penyeragaman dalam organisasi maupun pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Namun demi terwujudnya sistem penyuluhan pertanian yang profesional, dinamis dan efisien di Jawa Timur, ditawarkan lima model/pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Penerapannya dapat berdiri sendiri atau gabungannya yang disesuaikan dengan kondisi dan segmen kemampuan petani. Lima model/pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian itu adalah sistem kerja LAKU, LAKU-Modifikasi (LAKU-MOD), Layanan dan Konsultasi (LAKON), P4 K dan Swakarsa.

Sistem LAKU

- Prinsip kerja : Latihan 2 minggu sekali bagi penyuluh di BPP dan kunjungan dilakukan ke 10-12 kelompok tani (selama 5 hari kerja)
- Sarana : BPP dan alat transportasi
- Sasaran : Petani yang mobilitasnya rendah
- Kelebihan : Sifatnya aktif menjemput bola
- Kelemahan : Perlu mobilitas serta dukungan dana operasional tinggi

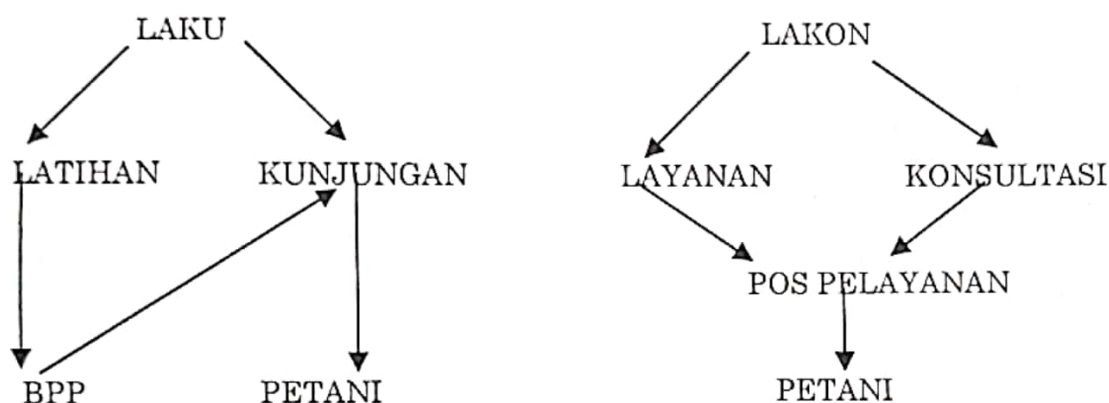
Sistem LAKU-MOD

- Prinsip kerja : Intensitas pelatihan dan kunjungan tetap dipertahankan, namun pelaksanaannya luwes.
- Sarana : BPP/KCD dan alat komunikasi
- Sasaran : Kelompok tani, Asosiasi profesi petani, AKTI
- Kelebihan : Sesuai dengan situasi transisi
- Kelemahan : Biaya operasional tinggi

Sistem LAKON

Prinsip kerja	: Layanan penyuluhan bersama dan menetap (agroinput, rosur, laboratorium, deteksi gangguan OPT dan sejenisnya). Konsultasi, meliputi teknologi, bimbingan usaha, informasi pasar.
Sarana	: Pos pelayanan konsultasi pertanian (konsultan, laboratorium, kios)
Sasaran	: Petani maju, pengusaha agribisnis
Kelebihan	: Pelayanan praktis dan cepat
Kelemahan	: Komersial tinggi

Perbedaan sistem kerja penyuluhan LAKU dan LAKON diilustrasikan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Diagram Penyelenggaraan Penyuluhan Sistem LAKU dan LAKON

Sistem Swakarsa

Prinsip kerja	: Swakarsa, kemitraan dan pemberdayaan petani. Petani belajar dari petani maju/KTNA yang telah berhasil, LSM dan swasta. Layanan yang diberikan adalah teknologi, agroinput, modal, pemasaran dan pendampingan.
Sarana	: Lahan dan kelompok usaha
Sasaran	: Petani
Kelebihan	: Memberdayakan masyarakat petani

Sistem P4 K

Prinsip kerja	: Identifikasi wilayah untuk menjaring kelompok binaan Pembinaan secara intensif dan berkesinambungan serta lintas sektoral
Sarana	: BPP, PPTK (petugas penyuluhan tk. kabupaten), transportasi
Sasaran	: Petani berpendapatan setara 320 kg beras
Kelebihan	: Efektif untuk petani kecil, pembinaan berkesinambungan selama 5 tahun. Monitoring dan evaluasi berjalan baik
Kelemahan	: Biaya tinggi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Jawa Timur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah kelompok tani yang ada saat ini adalah 29.791 kelompok, yang terdiri dari kelas Pemula 12.057, Lanjut 13.422 kelompok, Madya 4.027 kelompok, dan Utama 285 kelompok. Jumlah ini dianggap kurang optimal karena Jawa Timur mempunyai potensi menumbuhkembangkan 106.292 kelompok tani.
2. Diberlakukan Undang-undang Otonomi Daerah, diperkirakan penyuluh berkurang 50% karena beralih fungsi ke struktural. Hal ini menyebabkan rasio pelayanan menjadi 1 : 20.
3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum aktivitas penyuluhan pertanian menurun, indikatornya adalah:
 - a. Pelatihan yang dilakukan Dinas kabupaten/kecamatan dan penyuluh pertanian, paling sering dilakukan sekali dalam tiga bulan, yaitu 36%.
 - b. Kunjungan ke kelompok tani tertinggi dilakukan sebulan sekali yaitu 47%
 - c. Menghadiri pertemuan rutin kelompok, tertinggi dilakukan sebulan sekali, yaitu 40%.
 - d. Penyebaran materi informasi pertanian (brosur, lainnya) paling banyak 2-3 macam, yaitu 38%.
4. Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah membuahkan keragaman sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, organisasi/kelembagaan, serta mekanisme kerja penyuluh pertanian.
5. Penataan kelembagaan sebagai wadah penyuluhan pertanian di Jawa Timur bervariasi:
 - a. Wadah penyuluhan pertanian sekitar 65% berada di Dinas, 31% berada di KIPP/BIPP-KP/KUKP/Bimas-KP dan 3,5% pada KINLUH.
 - b. Kondisi ini menyebabkan jaringan kerjasama penyuluh pertanian pusat, propinsi, kabupaten hingga petani menjadi lemah.
6. Pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Jawa Timur ditawarkan lima model, yaitu LAKU, LAKU-MOD, LAKON, P4K dan Swakarsa. Dalam praktek penyelenggaraannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau gabungan dari lima model.

Saran

1. Perlu dilakukan penumbuhan, pengembangan dan pembinaan kelompok tani yang mengacu pada SK Mentan No. 93/Kpts/05.210/1997.
2. Diperlukan adanya acuan umum penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara nasional sebagai bahan pertimbangan daerah otonom.
3. Diperlukan kejelasan tanggung jawab pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam menunjang penyuluhan pertanian
4. BPP secara bertahap diperluas fungsinya sebagai pusat pelayanan pertanian, seperti saprodi, teknologi, informasi dan konsultasi

5. Diperlukan peninjauan kembali organisasi penyuluhan di kabupaten/kota yang kurang efektif dan efisien.
6. Perhimpunan sebagai wadah pengembangan penyuluhan dan wadah perjuangan penyuluhan pertanian perlu digerakkan.

DAFTAR PUSTAKA.

- BPTP Karangploso. 1997. Rencana Strategis Balai Pengkajian Teknologi Karangploso 1997-2007. BPTP Karangploso.
- Imam Utomo, S. 2000. Rencana Strategis dan Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2001-2003. Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Kunang Darmoko. 2002. Konsep Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Partisipatif Di Jawa Timur. Materi Lokakarya Penyuluhan Pertanian, Lawang 26-27 Juni 2002. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.
- Munandar, S. 2000. Penyuluhan Pertanian Masa Depan. Prosiding Lokakarya Nasional. Penyebaran Inovasi Pertanian Era Otonomi Daerah. Bogor 15-16 November 2000.
- , 2000. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Petanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Pemerintahan Daerah Jawa Timur. 2000. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005. Pemerintah Daerah Prop. Jawa Timur.
- Tim PPS. 2002. Sistem Penyuluhan Pertanian Pilihan Di Jawa Timur. Materi Lokakarya Penyuluhan Pertanian, Lawang 26-27 Juni 2002. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.
- Yunani dan Tim PPS. 2002. Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Di Jawa Timur. Materi Lokakarya Penyuluhan Pertanian, Lawang 26-27 Juni 2002. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.
- Van den Ban AW., Hawkins H.S. 1999. Penyuluhan Pertanian. Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Zachri, Z. 2000. Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah. Prosiding Lokakarya Nasional. Penyebaran Inovasi Pertanian Era Otonomi Daerah. Bogor 15-16 November 2000.

Tabel Lampiran 1. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten se Jawa Timur

No	Kabupaten	Nama Dinas	BPT/KI PP/ dll	Klpk Jabatan Fungsional	Subdin Penyuluhan	Jumlah BPP	KCD	Mantan
1	Gresik	Pertanian		Ada	Ada		18	18
2	Sidoarjo	(Pert. Perkeb & ternakan)		Ada	Ada	18		17
3	Mojokerto	Pertanian & KP		Ada		17		
4	Jombang	Pertanian & Perkebunan		Ada		4	21	
5	Bojonegoro	Pertanian		Ada	Ada	8	24	
6	Tuban	Pertanian	KIPPK	Ada		19	19	
7	Lamongan	Pertanian & perkehutan		Ada	Ada		26	15
8	Madiun	Pertanian T, Pangan	KIPPK		Ada	15		
9	Magetan	Pertanian	(Kin- luh)	Ada		15	15	
10	Ngawi	Per. T. Pangan & Hort		Ada	Ada	17	17	20
11	Ponorogo	Pertanian		Ada				
12	Pacitan	Pertanian & KP		Ada	Ada		12	
13	Kediri	Pertanian T, Pangan	BIPP- KP		Ada	23		
14	Nganjuk	Pertanian & Perkebunan		Ada	Ada	5		22
15	Blitar	Pertanian	KIPP	Ada		22		19
16	Tl. Agung	Pertanian	KIPPK			19		
17	Trenggalek	Pertanian & Perkebunan		Ada			14	33
18	Malang	Pertanian T, Pangan		Ada	Ada	33		24
19	Pasuruan	Pertanian	KPP-PP			14		24
20	Probolinggo	(Pert. Kehut & Perkeb)		Ada	Ada	24		
21	Lumajang	Pertanian		Ada		(6)	20	20
22	Bondowoso	Pertanian T, Pangan	(DinasK P)	Ada	Ada			17
23	Situbondo	Peranian		Ada		4		31
24	Jember	Pertanian T, Pangan		Ada	Ada	8		21
25	Banuwangi	Pertanian		Ada	Ada		5	13
26	Pamekasan	Pertanian	KUKP	Ada		4		
27	Bangkalan	Pertanian & Pernakan	KUKP			18		
28	Sampang	Pertanian T, Pangan	Bimas- KP	Ada	Ada	5	12	
29	Sumenep	Pertanian T, Pangan		Ada	Ada		25	